

T E S I S

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PERUSAHAAN
YANG MEMBAYAR UPAH PEKERJA/BURUH DI BAWAH
UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003**



Diajukan oleh:

SUPARDI
NPM.: 18310018

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2020

T E S I S
**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PERUSAHAAN
YANG MEMBAYAR UPAH PEKERJA/BURUH DI BAWAH
UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh

SUPARDI

NPM. : 18310018

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2020**

TESIS

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBAYAR UPAH PEKERJA/BURUH DI BAWAH UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

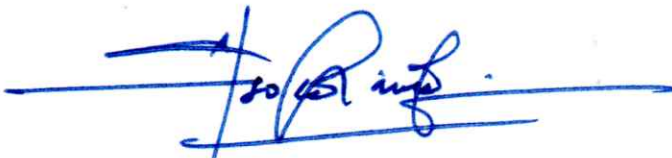
Diajukan oleh :

SUPARDI
NPM: 18310018

Tesis Ini Telah Disetujui Untuk Diuji
Tanggal 24 Juli 2020

Oleh :

Pembimbing I



Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.


Pembimbing II



Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

TESIS

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBAYAR UPAH PEKERJA/BURUH DI BAWAH UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Dipersiapkan dan disusun oleh :

SUPARDI
NPM: 18310018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 24 Juli 2020

Susunan Dewan Penguji :

Nama Penguji

Tanda Tangan

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

Ketua



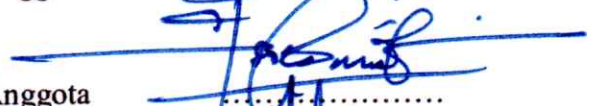
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.

Anggota



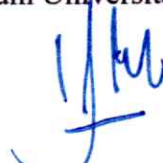
Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

Anggota



Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. beserta para sahabat dan umatnya. Dengan ini peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Membayar Upah Pekerja/Buruh Di Bawah Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Sebagai manusia yang merupakan makhluk yang penuh keterbatasan, dimungkinkan dalam penelitian ini ada kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mengharap arahan berupa kritik dan saran dari semua pihak yang membaca Tesis ini.

Dalam kesempatan ini pula tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan untuk memberikan bantuan bimbingan serta saran yang membantu dalam penelitian ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Suhandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan penyusunan Tesis ini.

4. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu atas segala kasih dan perhatian mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Para staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, atas bantuan yang yang diberikan kepada peneliti selama ini.
7. Kepada ayahanda Suparlan dan ibunda Sukarma, Paklik H. Ir. Mistawi dan Bulik Hj. Sahra, S.H., yang telah memberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan hukum dan doa yang tulus.
8. Isteriku Wiwik Sri Wahyuni, SE anak-anakku Rangga Ilham W.P., Rayhan Dwi Kusuma, Alesha Widi Zahira dan Ayu Putri Parwati yang telah memberikan doa demi lancarnya studi dan kesabaran yang tulus.
9. Teman-teman seangkatan tahun 2018 yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna didalam perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum. Amin.

Surabaya, 21 Juli 2020

SUPARDI
NPM : 18310018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supardi
NPM : 18310018
Alamat : Dukuh Pakis Gg. VI no. 23 Kota Surabaya
No. Telp.(HP) : 081515780090

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Membayar Upah Pekerja/Buruh Di Bawah Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (*plagiat*) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya Tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplaiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 21 Juli 2020

Yang menyatakan,



6000
ENAM RIBURUPIAH
SUPARDI
NPM : 18310018

ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Membayar Upah Pekerja/Buruh Di Bawah Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” dengan tujuan: untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh atas hak upah dalam hubungan industrial berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, serta mengetahui penerapan sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar upah pekerja/buruh di bawah upah minimum.

Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan beserta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang kemudian dianalisa terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisa dan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa: Upah (atau gaji) adalah hak pekerja/buruh yang dilindungi oleh hukum, sehingga sudah selayaknya bahwa setiap pekerja/buruh mendapatkan upah. Sebagai hak, maka sangat wajar jika pekerja/buruh menuntut untuk mendapatkan upah. Pengusaha yang tidak member upah pun dikenai sanksi secara hukum. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa upah dapat diartikan sebagai pembayaran atau imbalan, yang wujudnya dapat bermacam macam seperti upah harian, upah borongan, upah tetap, upah tidak tetap, yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang atau/suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atau usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya; Penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten/Kota Apabila perusahaan melanggar ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka pekerja dapat menempuh upaya pidana yakni melaporkan ke pihak pengawas ketenagakerjaan. Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: sanksi pidana, pekerja/buruh, upah minimum, perusahaan

ABSTRACT

In this study the researchers used the title "The Implementation of Criminal Sanctions for Companies that Pay Workers' Wages Below the Minimum Wage Based on Law Number 13 of 2003" with the aim: to find out the Legal Arrangements against Workers/Laborers on wage rights in industrial relations based on the Act No. 13 of 2003, as well as knowing the application of criminal sanctions for companies that pay workers/laborers below the minimum wage.

The form of this research method is normative legal research, so in this study an approach to statutory regulations and views and doctrines in legal science are then analyzed on the application of law to resolve legal issues in this study.

Based on the results of the analysis and assessment carried out in this study, the researcher states that: Wages (or salaries) are the rights of workers/laborers protected by law, so it is only fitting that every worker/laborer receives wages. As a right, it is very natural for workers/laborers to get paid. Employers who do not pay members are also subject to legal sanctions. It can be simply stated that wages can be interpreted as payments or rewards, the form of which can vary as daily wages, piece rates, fixed wages, fixed wages, made or given by someone or/an institution or agency to another person or business, work and work performance or service (servicing) he has done; Enforcement of criminal sanctions against companies that pay workers' wages below the regency/city minimum wage If the company violates the regency/city minimum wage provisions, then workers can take criminal measures to report to the labor inspector. The criminal threat for employers who pay workers' wages below the minimum wage is a minimum jail sentence of 1 (one) year and a maximum of 4 (four) years and/or a fine of at least IDR 100 million and a maximum of IDR 400 million. As stipulated in article 185 paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.

Keywords: *criminal sanctions, workers/laborers, minimum wages, companies*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Teoritis	6
1. Pengertian Upah	6
2. Asas Pengupahan	8
3. Teori Upah	10
4. Jenis Upah	12
5. Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan	14
a. Buruh (Pekerja)	14
b. Perusahaan	17

c. Serikat Pekerja (Serikat Buruh)	18
d. Pemerintah (Penguasa)	20
6. Perlindungan Buruh	23
E. Metode Penelitian	25
1. Tipologi Penelitian	26
2. Metode Pendekatan	26
3. Bahan Hukum	27
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	29
F. Pertanggungjawaban Sistematis	30

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH

ATAS HAK UPAH DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2003	32
A. Upah Sebagai Unsur Penting dalam Kaitannya dengan Hubungan Kerja	32
B. Upah dalam Kaitannya dengan Para Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan	35
C. Bentuk dan Waktu Perjanjian Kerja	38
D. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja	39
1. Kewajiban Pekerja	39
2. Kewajiban Pengusaha	40
E. Sistem-Sistem Pengupahan	40
F. Upah Lembur dan Waktu Kerja	45

G. Perlindungan Upah	49
H. Peran Pemerintah dalam Pengupahan di Indonesia	50
BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PERUSAHAAN	
YANG MEMBAYAR UPAH PEKERJA/BURUH DI BAWAH	
UPAH MINIMUM	56
A. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perusahaan Yang	
Membayar Upah Tenaga Kerja Di Bawah Upah Minimum	
Kabupaten/Kota	56
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Sanksi Hukum	
Pidana Bagi Perusahaan Membayar Upah Tenaga Kerja	
Di Bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota	61
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	